

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh laut. Hal ini dapat terlihat dari luas perairan lautnya mencapai 3.257.483 km² (belum termasuk perairan ZEE). Sementara itu panjang garis pantainya yang mencapai 81.497 km² merupakan garis pantai terpanjang di dunia (Pradiasti, 2010). Hal ini memberikan potensi untuk dikembangkannya usaha di wilayah pesisir salah satunya adalah usaha garam.

Namun ternyata, kekayaan perairan laut yang begitu luas tidak menjadikan negara Indonesia merupakan negara pengekspor garam justru sebaliknya Indonesia sangat lekat dengan sebutan negara pengimpor garam yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Selama ini produksi garam nasional dilakukan oleh PT. Garam selaku BUMN dan oleh petani garam atau biasa dinamakan garam rakyat. Data yang dipaparkan oleh Maulida (2010) menunjukkan kebutuhan garam dalam negeri untuk kebutuhan konsumsi dan industri sebesar 2,8 juta ton per tahun. Selama ini produksi garam baik oleh rakyat maupun oleh PT. Garam adalah sebesar 1,2 juta ton dan kekurangannya sebesar 1,6 juta ton masih dipenuhi dari impor (Ihsanuddin, 2011).

Sementara itu, menurut Ihsannudin (2011) produksi garam di Madura berkontribusi 60% terhadap produksi garam nasional, sehingga tidak mengherankan jika Pulau Madura juga dijuluki sebagai “Pulau Garam” oleh masyarakat. Ini tidak terlepas dari faktor alam (*endowment*) sehingga Madura mampu memproduksi garam dalam jumlah besar. Kabupaten Sampang merupakan salah satu wilayah penghasil garam di Madura yang luas lahannya mencapai 3.583,8 Ha yang terbagi dari 6 Kecamatan. Menurut hasil survey lapangan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang tahun 2012, dari 6 Kecamatan tersebut luas lahannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Rekapitulasi Luas Lahan dan Produksi Garam Rakyat Di Kabupaten Sampang Tahun 2012

Sampang Tahun 2022				
No	Kecamatan	Kel/Desa	Luas Lahan Pugar (ha)	Total Produksi (Ton)
1	Sampang	a. Karang Dalem	10,1	647,9
		b. Aeng Sareh	173,3	12.555,3
		c. Polagan	478,8	49.781,6
		d. Banyuanyar	28,2	2.319,9
		Total	690,4	65.304,7
2	Camplong	a. Darma Camplong	19,4	1.311,5
		b. Tambaan	51,8	3.265,8
		c. Taddan	19,4	1.364,0
		Total	90,6	5.941,3
3	Pengarengan	a. Ragung	407,8	54.546,7
		b. Apa'an	133,5	15.824,3
		c. Pengarengan	144,7	18.000,5
		Total	686,0	88.371,5
4	Jrengik	a. Asam Rajah	122,2	6.101,8
		b. Asem Nunggal	213,8	12.578,0
		Total	336,0	18.679,8
5	Sreseh	a. Sreseh	122,5	9.575,1
		b. Taman	80,8	5.859,3
		c. Plasah	26,0	1.874,4
		d. Klobur	16,1	1.458,5
		e. Labang	21,6	1.487,7
		f. Labuhan	7,4	859,3
		g. Marparan	618,0	34.693,1
		h. Disanah	854,4	73.872,8
		Total	1.746,8	129.680,2
6	Banyuates	Masaran	34,0	3.006,8
		Total	34,0	3.006,8
Jumlah Total			3.583,8	314.568,1

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang 2012

Berdasarkan tabel di atas, Jumlah total luas lahan garam di Kabupaten Sampang mencapai 3.583,8 Ha. Ini artinya Kabupaten Sampang menguasai sekitar 44,5% luas lahan garam di Jawa Timur dan 26,8% luas lahan garam nasional. Dengan ladang garam yang demikian luas dan kapasitas produksi yang cukup besar, tentunya pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan potensi garam di Kabupaten Sampang dengan tujuan peningkatan produktivitas dan kualitas garam rakyat. Namun, luas lahan pegaraman yang sangat luas tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani garam di Kabupaten Sampang pada khususnya yang masih berkutut dengan kemiskinan.

Padahal hal ini selayaknya tidak akan terjadi, karena Indonesia memiliki potensi luas lahan garam 34.174 Ha dan yang baru dimanfaatkan sekitar 20.000 Ha. Untuk itu pemerintah berupaya mencapai swasembada garam salah satunya dengan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Program PUGAR merupakan program pemberdayaan yang difokuskan pada kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan petambak garam. Fungsinya memperkuat kapasitas sumberdaya manusia pada masyarakat pesisir, penguatan kelembagaan dan pemangku kepentingan di sektor garam (Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2012). Dalam hal ini pemerintah melakukan terobosan-terobosan untuk memperbaiki produktivitas sumberdaya pegaraman dan melalui bantuan-bantuan yang hal ini menjadi tanggung jawab Menteri Kelautan dan Perikanan. Adapun rincian bantuan tersebut berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan total bantuan sebesar Rp.34,2 miliar. Bantuan tersebut, diantaranya berupa; Bantuan Langsung Masyarakat Program PUGAR untuk Kabupaten Sumenep, Bangkalan, Pamekasan dan Sampang sebesar Rp 22,2 miliar. Bantuan tersebut disampaikan oleh pemerintah yakni untuk meningkatkan hasil garam nasional dan target untuk swasembada garam.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam dampak adanya program PUGAR terhadap pendapatan petani garam. Untuk itulah penulis mempunyai keinginan untuk melakukan penelitian dan menganalisis tentang bagaimana tingkat pendapatan petani garam peserta program PUGAR dan non PUGAR di Kabupaten Sampang.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas di dapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keragaan usaha pegaraman peserta program PUGAR ?
2. Bagaimana analisis finansial petani garam non program PUGAR ?
3. Apakah terdapat perbedaan pendapatan antara petani garam peserta program PUGAR dan petani garam non program PUGAR?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu permasalahan diatas diharapkan mampu menjawab berbagai tujuan berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana keragaan usaha pegaraman peserta program PUGAR.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis finansial petani garam non program PUGAR.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pendapatan antara petani garam peserta program PUGAR dan petani garam non program PUGAR.